

DILEMA PENGGUNAAN FIGUR SENTRAL: ANTARA IDEALISME DAN KEBUTUHAN SUARA BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

M. Rizky Ganda Utama¹, Ratnia Solihah², Firman Manan³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Koresponden E-mail: mrgandahutama@gmail.com

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4353

Abstract

This study discusses the dilemma that occurs in PSI between maintaining party ideals by not using figures or maximizing votes in the first election. The purpose of this study is to discuss how figures play a role in the success of political parties in getting votes in elections. The method used in this study is a qualitative method using two data sources. The data collection technique used is through interviews and from other sources related to this research such as books, journals, and mass media. The theory used in this study is the social dilemma theory proposed by Weiten. The result of this study is that PSI's decision not to use figures as part of its political strategy had a negative impact on vote gains so that PSI failed to reach the parliamentary threshold in its first election. PSI was only able to reach the 12th position of the 19 competing parties. In contrast to the results at the national level, in DKI Jakarta PSI got quite significant results. This is inseparable from the figure of Ahok who indirectly influences PSI's political strategy in DKI Jakarta. As long as figures still play a role as determinants of people's choices, the existence of figures must be included as part of the strategy of every political party. By elaborating between party figures and platforms, the new party will get the maximum benefit

Key Words: PSI, figure, election

Abstrak

Penelitian ini membahas dilema yang terjadi di PSI antara mempertahankan cita-cita partai dengan tidak menggunakan angka atau memaksimalkan suara pada pemilu pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana peran tokoh dalam keberhasilan partai politik dalam memperoleh suara dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan dua sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dari sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan media massa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dilema sosial yang dikemukakan oleh Weiten. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan PSI untuk tidak menggunakan angka sebagai bagian dari strategi politiknya berdampak negatif terhadap perolehan suara sehingga PSI gagal mencapai ambang batas parlemen pada pemilu pertamanya. PSI hanya mampu meraih posisi ke-12 dari 19 partai yang bersaing. Berbeda dengan hasil di tingkat nasional, di DKI Jakarta PSI mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari sosok Ahok yang secara tidak langsung mempengaruhi strategi politik PSI di DKI Jakarta. Selama tokoh masih

berperan sebagai penentu pilihan masyarakat, keberadaan tokoh harus dimasukkan sebagai bagian dari strategi setiap partai politik. Dengan mengelaborasi antara figur partai dan platform, partai baru akan mendapatkan keuntungan maksimal

Kata Kunci: *PSI, Tokoh, Pemilihan Umum*

I. PENDAHULUAN

Sistem kepartaian Indonesia masih sangat mengandalkan figur sentral sebagai penentu dalam setiap pengambilan keputusan terutama dalam hal strategi partainya. Meskipun sangat berguna, kehadiran figur sentral dalam partai politik bukan tanpa resiko. Kecenderungan partai terhadap figur sentral ini akan menjauhkan partai figur-figur lain yang memiliki potensi untuk membawa partai ke arah yang lebih baik. Ketergantungan terhadap figur sentral akan membuat partai terasa tua dan kebijakan yang dikeluarkan akan terasa monoton, sehingga akan menghambat proses modernisasi dan melemahkan partai. Akan tetapi, figur sentral memiliki pengaruh besar untuk strategi politik electoral. Figur ini menjadi simbol utama yang ditawarkan partai kepada masyarakat sebagai komoditas unggulan partai.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Marcus Mietzner menemukan terjadinya lompatan besar dalam politik Indonesia merupakan wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai untuk mencalonkan orang yang populer. Sebelumnya orang lebih fokus kepada pengaruh politik atau kapasitas finansial calon, akan tetapi belakangan ini popularitas telah menggeser hal tersebut. Popularitas individual merupakan senjata paling ampuh yang ditemukan partai politik selama puluhan tahun berjibaku dalam pemilu (Mietzner, 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Liddle dan Munjani dalam penelitiannya. Bahwa kepemimpinan

partai memiliki pengaruh kuat dalam menentukan perilaku memilih. Penelitian ini berpendapat bahwa sepanjang sejarah pemilu, pemimpin partai memiliki pengaruh kuat terhadap suara populer di Indonesia, adanya korelasi yang kuat antara kepemimpinan partai dengan kecenderungan untuk memilih kandidat atau partai tertentu (Liddle & Mujani, 2007). Akan tetapi pada saat yang sama, terjadi kegagalan untuk mengembangkan partai dan menjalankan suksesi kepemimpinan partai. Yang terjadi justru partai menjadi bergantung pada figure sentral untuk menaikkan elektabilitas partai dan meraih suara menjadi fokus yang paling penting.

Pasca Reformasi, sebagian besar partai politik Indonesia masih lekat dengan tokoh-tokoh sentral yang menduduki jabatan tertinggi di masing-masing partainya. Sebagian dari mereka menjabat sebagai ketua umum partai, dan beberapa menjabat sebagai dewan pembina. Meskipun berlainan jabatan, salah satu ciri yang dari figur sentral ini adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang kharismatik dan masa kepemimpinan yang lama. Disini terlihat sekali bagaimana partai politik di Indonesia begitu kesulitan melanjutkan suksesi kepemimpinan dan hanya bergantung pada tokoh sentral. lambannya laju rotasi kepemimpinan dan periodisasi kepemimpinan yang relatif lama, menjadikan kader baru lamban mencuat sehingga tidak ada figur alternatif untuk menyaingi senior-senior yang sudah lama bergelut di dunia politik.

Merujuk pada permasalahan di atas, Hal berbeda justru ditunjukkan oleh PSI, sejak awal kemunculannya PSI berkomitmen untuk tidak menggunakan figur sebagai alat menaikkan elektabilitas partai dan penarik massa. Dalam strategi politiknya, PSI lebih mengutamakan penguatan Citra daripada penggunaan figur. Akan tetapi hal tersebut justru berdampak pada hasil yang kurang baik pada pemilu pertamanya.

Pemilhan umum tahun 2019 diikuti oleh 19 partai nasional dan 6 diantaranya merupakan partai baru. PSI merupakan salah satu partai baru, yang terbentuk pada tahun 2014 dengan dikomandoi oleh Grace Natalie yang menjabat sebagai ketua umum PSI. Garce Natalie sendiri merupakan sosok baru dalam dunia politik di Indonesia. Sebelumnya Grace Natalie berprofesi sebagai Jurnalis lalu pada tahun 2009 beralih profesi menjadi CEO Saiful Munjani Research dan pada tahun 2012 mulai terlibat dengan politik dengan mendirikan PSI. Setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual yang ditetapkan oleh KPU, PSI maju sebagai peserta dengan nomor urut 11.

Pada pemilu pertamanya, PSI mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Dari hasil rekapitulasi KPU, pada tingkatan nasional PSI harus puas meraih posisi 12 dari 19 partai yang bersaing pada pemilu 2019 dengan capaian suara sebanyak 2.650.361 (1,89%). Sebetulnya secara personal ada beberapa kader PSI yang mendapatkan suara yang signifikan yaitu ketua umum PSI Grace Natalie yang merupakan caleg PSI nomor urut 5 mendapatkan suara tertinggi di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta III yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan total suara sebanyak 179.949. kemudian ada

Tsamara Amany caleg PSI dari dapil 2 mendapatkan suara sebanyak 103.599. Akan tetapi raihian perosnal dan total suara PSI belum cukup mengantarkan PSI untuk lolos *parliamentary treshold*. Di tingkat daerah PSI berhasil menuliskan catatan sejarah baru bagi partainya dengan berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif (Merdeka.com, 2019). Dan yang terbanyak di DKI Jakarta sebanyak 8 kadernya lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Hasil tersebut cukup kontras jika dibandingkan dengan debut partai baru lain pada pemilu sebelumnya. Partai demokrat yang memulai debut pemilu pertamanya pada pemilu legislatif 2004, partai demokrat berhasil meraih peringkat ke-5 dengan capaian suara sebanyak 8.455.225 (7,45%) dan mendapatkan 57 kursi di DPR (Demokrat, n.d.). lalu ada partai Nasdem yang memulai debutnya pada pemilihan legislatif tahun 2014 dengan hasil suara sebanyak 8.402.812 suara (6,7%) (Partai NasDem, n.d.). Dari hasil ini bisa kita lihat suara PSI jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan raihian suara partai Demokrat dan partai NasDem di kontestasi pemilu pertamanya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan partai dalam mendulang suara, salah satunya yaitu keberadaan figur dalam partai politik. Keberadaan figur SBY di Demokrat dan Surya Paloh di partai NasDem menjadi pembeda dengan PSI yang pada pemilu pertamanya tidak memiliki figur yang kuat.

Sebelum penelitian ini dibuat, sudah ada beberapa penelitian terkait Figur Sentral dalam Partai politik yang sudah dipublikasikan. Penelitian-

penelitian tersebut, menjadi rujukan yang digunakan penulis dalam membuat penelitian ini. Beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan diantaranya: *The Trap Of Pop-Charisma For The Institutionalization Of Indonesia's Post-Suharto Parties* (Fionna, 2016), *Faktor Figur Dalam Keterpilihan Anggota DPRD Studi Kasus: Keterpilihan Anggota DPRD Dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung Pada Pemilu 2014* (Permatasari et al., 2013), *Orientasi Pemilih Terhadap Figur Politik (Studi Pemilu Di Jawa tengah)* (Sofianto, 2013). Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai Figur Sentral dan pengaruhnya kepada partai politik, akan tetapi terdapat beberapa hal yang membedakan yaitu subjek, objek penelitian, dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut dengan judul *Dilema Figur Sentral: Antara Idealisme dan Kebutuhan Suara Bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)*

II. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena terkait apa yang dialami oleh objek dalam suatu penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi yang diungkapkan dengan kata-kata dan dalam bahasa dengan tetap memanfaatkan berbagai metode (Lexy, 2004). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mamaparkan secara jelas dan terperinci terkait data yang ditemukan di lapangan mengenai Dilema yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia.

Untuk memotret fenomena sosial-politik yang menjadi topik dalam penelitian ini, maka penulis beranggapan bahwa metode kualitatif relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di kantor DPP PSI. sumber data pada penelitian ini terbagi dua yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kedua, data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi terkait data-data yang relevan.

Dalam hal menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Bungin, prosedur purposive ini adalah penggunaan informan kunci yang menguasai informasi yang relevan dengan masalah penelitian (Burhan Bungin, 2007). Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengolahan data memadukan data primer dan sekunder dan membandingkannya sampai mendapatkan kecocokan dan menghasilkan kesimpulan yang berdasar.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Dilema sosial merupakan situasi dimana setiap anggota dari sebuah kelompok memiliki insentif yang jelas dan tidak ambigu untuk menentukan sebuah pilihan yang ketika pilihan itu disetujui oleh semua anggota kelompok maka akan memberikan hasil yang lebih buruk bagi semua ketimbang yang akan mereka terima. Dan keputusan yang tidak dipilih justru menghasilkan kebaikan bersama khususnya dalam

jangka panjang (collective interest)(Weiten, 2013). Hasil utama dari berbagai studi dilema sosial adalah bahwa terdapat sejumlah faktor yang menentukan apakah orang akan berkooperasi atau defek dalam situasi dilema sosial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya kecenderungan bahwa politik saat ini berbasis pada individual atau “*figur-based politics*” yang menduduki posisi publik seperti pemimpin daerah provinsi dan kabupaten/kota) (Savirani et al., 2014). Partai-partai baru pada pemilu 2019 juga turut menjadikan figur sebagai bagian dari strategi politiknya. Contohnya partai Berkarya dengan figur sentralnya yaitu ketua umum yang dijabat oleh Tommy Soeharto. Selain itu partai Perindo yang juga figur sentralnya terletak pada posisi ketua umum yang dijabat oleh Harry Tanoe Soedibjo. Dua nama ini merupakan nama yang tidak asing dalam dunia politik Indonesia. Penggunaan figur sebagai bagian dari strategi politik bukan tanpa alasan karena menurut Zuborova, selain karena ide dan kebaruan yang ditawarkan, salah satu yang menjadi penentu dalam keberhasilan partai politik baru yaitu aspek kepemimpinan partai (Žúborová, 2015). Sejalan dengan itu, menurut Harmel dan Svasand, kepemimpinan dengan sosok yang berkarisma atau populer, yang mungkin bisa menarik pendengar atau khalayak ramai dan mengasosiasikannya tidak hanya dengan pemimpin, tetapi dengan partai. Dengan adanya pemimpin partai yang memiliki karakteristik tersebut, akan mendapatkan manfaat ketika loyalitas pemilih masih cair. Banyaknya pemilih yang cenderung berhubungan dengan partai baru melalui kepribadian tertentu

dari pemimpin partainya. Pemimpin partai seringkali dianggap lebih penting, untuk pengakuan publik daripada program partai. Hal ini terjadi karena sebagian pemilih tidak memiliki pengetahuan atau informasi politik yang sama (Harmel & Svåsand, 2007).

Hal berbeda justru dilakukan PSI, sebagai partai baru PSI dituntut untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi pembeda antara partainya dengan partai lain. Untuk itu PSI membangun citra sebagai partai anak muda yang terbuka dan progresif. Demi mewujudkan citranya sebagai partai anak muda, PSI berusaha untuk melepaskan diri dari kecenderungan partai personalistik. Figur yang biasanya melekat pada jabatan ketua umum ini tidak terlihat pada PSI. Grace Natalie sebagai ketua umum tidak memiliki basis sosial yang kuat di masyarakat. PSI memilih orang-orang baru yang tidak memiliki pengalaman politik daripada figur lama yang sudah kenal luas dan memiliki pengalaman juga basis masa yang jelas sebagai calon legislatifnya pada pemilu 2019. Menurut Sekretaris Jendral PSI, dipilihnya orang-orang baru sebagai caleg PSI ini bertujuan untuk mempermudah dalam menanamkan asas dan arah politik PSI. Orang-orang lama yang sudah berpengalaman cenderung akan membawa kultur lama yang sulit untuk di ubah (CNN Indonesia, 2018).

PSI menganggap ketiadaan figur sebagai tantangan yang harus dihadapi. Karena tokoh-tokoh politik yang dimiliki adalah politisi baru dan sebagian besar merupakan anak muda. Menurutny jika mengandalkan tokoh PSI akan kesulitan jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh politisi lama dari partai lain. Untuk itu PSI lebih mengandalkan gagasan dan program yang ditawarkan). Keputusan ini didasari oleh prinsip internal PSI untuk

tidak melakukan penokohan terhadap figur tertentu yang dapat menghilangkan objektifitas dan nilai-nilai meritokrasi (wawancara dengan ketua DPW PSI DKI Jakarta).

Di satu sisi, keputusan untuk tidak menggunakan figur sebagai bagian dari strategi politiknya justru kemudian berdampak buruk terhadap popularitas PSI dan raihan hasil suara pada pemilu pertamanya. Sejak ditetapkan sebagai peserta hingga menjelang pemilu, PSI terlihat kesulitan dalam menaikan elektabilitas partainya. Berdasarkan hasil rilis lembaga survei, elektabilitas PSI tidak pernah mencapai 5%, berikut hasil rilis survei elektabilitas PSI dalam beberapa lembaga survei: Poltracking 1,4%, litbang Kompas 0,9%, Charta Politika 1,4%, Vox Populi 3,7% (KOMPAS.com, 2019). Beberapa cara telah dilakukan PSI dari yang sifatnya substansial hingga yang sifatnya kontroversial, namun nyatanya tetap tidak berhasil menaikan elektabilitas PSI. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya elektabilitas partai, salah satunya figur. Ketiadaan figur di PSI turut mempengaruhi popularitas PSI di mata masyarakat sebagaimana dengan yang dikemukakan oleh Nimmo (2008), dengan adanya modal popularitas maka akan lebih mudah bagi seseorang atau figur tersebut untuk mencuri perhatian masyarakat, melalui pemberitaan media yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan atau mendongkrak elektabilitas. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dibangun pencitraan yang baik ditengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut (Nimmo, 2004).

Hasil survei yang buruk ini kemudian diikuti dengan perolehan hasil yang buruk pula. Pada pemilu

pertamanya PSI gagal mencapai ambang batas parlemen. Dengan hasil ini tidak seorangpun caleg dari PSI yang berhasil mendapatkan kursi di tingkat nasional. Hasil positif justru terlihat pada tingkatan lokal khususnya di DKI Jakarta. PSI menjadi partai ke empat terbesar dengan presentase suara 6,72%. Dengan hasil itu PSI berhasil mendapatkan 8 kursi DPRD DKI Jakarta. Ini merupakan raihan terbesar PSI selama mengikuti pemilu pertamanya. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari keberadaan figur Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih biasa dikenal dengan sebutan Ahok. Meskipun bukan sebagai kader PSI, figur Ahok begitu berpengaruh terhadap keberhasilan PSI di Jakarta.

Pengaruh figur Ahok dapat dilihat dari banyaknya anggota teman Ahok yang bergabung menjadi kader dan caleg melalui PSI. Menurut ketua DPW PSI DKI Jakarta, 1/3% dari pengurus PSI DKI Jakarta merupakan mantan relawan Ahok selama Pemilihan Gubernur DKI 2017 yang tergabung dalam jaringan teman Ahok. Polarisasi yang terjadi selama pilgub DKI Jakarta dimanfaatkan untuk mempertegas positioning dan segmentasi pemilih PSI. Pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 masyarakat yang memilih Ahok sebanyak 42%. Untuk itu PSI menggunakan 42% suara pemilih Ahok sebagai segmentasi pemilihnya. Data persebaran suara ini dijadikan patokan untuk menentukan titik-titik kampanye Calon legislatif PSI DKI Jakarta (Wawancara ketua DPW PSI DKI Jakarta). Dalam arti lain, PSI fokus berkampanye di pasar yang sudah terbentuk sejak Pemilihan Gubernur 2017 yaitu segmen pemilih Ahok. Dari hasil ini, dapat dilihat hasil kolaborasi anatar figur dengan platform partai telah menghasilkan sesuatu yang baik.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan akan sebuah strategi terkadang menimbulkan dilema. Seperti yang terjadi pada PSI, penggunaan figur sentral sebagai bagian dari strategi politiknya akan bertentangan dengan nilai dasar perjuangan PSI dan berpengaruh terhadap citra yang sedang PSI bangun. Selain itu adanya kekhawatiran akan mengganggu pelebagaan partainya. Sebagaimana yang dikemukakan Panebiancio, bahwa meskipun pihak-pihak mungkin bergantung pada seorang pemimpin (figure sentral) dalam tahap pembentukan, figur itu sendiri akan mengganggu pelebagaan dan partai-partai harus melepaskan diri dari para pemimpin karismatik. Banyak pihak dengan asal karismatik gagal bertahan dari hilangnya pendirinya (LaPalombara, 1990). Akan tetapi jika tidak menggunakan figur sentral dalam bagian strategi politiknya, hal ini membuat PSI lebih sulit untuk menaikan popularitas partai dan meraih suara pemilih. Dalam menghadapi dilema ini, PSI dituntut untuk memilih apakah akan tetap bersikukuh dengan tidak menggunakan figur sentral atau berkooperasi untuk mendapatkan hasil maksimal.

V. KESIMPULAN

Dalam setiap pemilihan strategi tentu akan ada konsekuensi terhadap satu atau beberapa hal yang harus diterima, termasuk dalam memilih strategi politik. Memilih menggunakan figur atau memilih untuk tidak menggunakan figur keduanya ada konsekuensi yang ditimbulkan. Selama figur masih menjadi sumber rujukan masyarakat dalam memilih kandidat atau partai politik di Indonesia, maka untuk mewujudkan cita-citanya dalam meraih kekuasaan, partai harus turut

menggunakan figur sebagai bagian dari straregi politiknya. Penggunaan figur sentral sebagai strategi politik dapat membantu partai politik khususnya partai politik baru untuk menaikan elektabilitasnya. Meskipun begitu, tidak semua figur dapat diterima langsung oleh masyarkat. Perlu adanya analisis yang mendalam untuk memilih bagaimana figur yang disukai publik dan sesuai dengan karakter partai. Dengan memilih figur yang tepat, tidak hanya elektabilitas yang akan terangkat melainkan juga dukungan yang sebelumnya ditujukan kepada figur akan mengalir kepada partai politik. Akan tetapi, partai politik tidak bisa semata-mata bergantung pada figur sebagai strategi politiknya. Perlu adanya elaborasi antara figur dengan platform partai seperti ideologi, visi-misi, dan program-program partai. Jika partai politik sudah cukup dikenal masyarakat partai harus mengganti keberadaan figur lama dengan mempersiapkan dan melakukan regenerasi untuk figur berikutnya yang lebih terampil. Jika dalam jangka panjang PSI ingin menjadi partai yang terlibat dalam perubahan kebijakan nasional maka PSI harus mampu bersaing untuk lolos ambang batas dan membawa kadernya menduduki jabatan DPR RI. Jika melihat staretgi yang diterapkan sebelumnya hal ini akan terasa sulit bagi PSI. Perlu evaluasi menyeluruh khususnya terkait penggunaan figur sebagai bagian dari strategi politiknya. Dilema yang terjadi pada pemilu sebelumnya seharusnya tidak perlu terjadi jika PSI mampu mengkolaborasikan keberadaan figur dengan platform partai yang PSI miliki. Paltform yang dimaksud termasuk dengan bagaimana PSI menyiapkan figur-figur baru agar regenerasi tetap

terjadi sehingga menjauhkan PSI dari partai personalistik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.
- CNN Indonesia. (2018). *PSI Siap Usung 55 Bakal Caleg Tanpa Pengalaman*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180408091344-32-289195/psi-siap-usung-55-bakal-caleg-tanpa-pengalaman>
- Demokrat. (n.d.). *Sejarah - Partai Demokrat*. Retrieved July 28, 2021, from <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>
- Fionna, U. (2016). The trap of pop-charisma for the institutionalization of Indonesia's post-Suharto parties. *Asian Journal of Political Science*, 24(1), 124–141.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2015.1136227>
- KOMPAS.com. (2019). *Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/09451171/elektabilitas-parpol-menurut-survei-terbaru-tiga-lembaga>
- LaPalombara, J. (1990). *Political Parties: Organization and Power*. By Angelo Panebianco. Translated by Marc Silver. New York: Cambridge University Press, 1988. 360p. \$54.50 cloth, \$16.95 paper. *American Political Science Review*.
<https://doi.org/10.2307/1963705>
- Lexy, J. M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*.
<https://doi.org/10.1177/0010414006292113>
- Merdeka.com. (2019). *Gandeng ICW, PSI Bekali 67 Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi | merdeka.com*.
<https://www.merdeka.com/politik/gandeng-icw-psi-bekali-67-anggota-legislatif-terpilih-agar-tidak-korupsi.html>
- Mietzner, M. (2009). Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic consolidation? *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003644>
- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Partai NasDem. (n.d.). *Sejarah Partai NasDem- Partai NasDem*. Retrieved July 28, 2021, from <https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem>
- Permatasari, Y., Azhar, M. A., & Apriani, K. D. (2013). *FAKTOR FIGUR DALAM KETERPILIHAN ANGGOTA DPRD STUDI KASUS: KETERPILIHAN ANGGOTA DPRD DARI PARTAI GERINDRA KABUPATEN KLUNGKUNG PADA PEMILU 2014*. 11(2).
- Savirani, A., Tornquist, O., & Stokke, K. (2014). *Demokrasi Di Indonesia*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/w5ejk>
- Sofianto, A. (2013). *ORIENTASI PEMILIH TERHADAP FIGUR*

POLITIK (Studi Pemilu di Jawa Tengah). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 11(2).
Weiten, W. (2013). Psychology Themes

& Variations 8th Edition. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.